

Kontestasi Penguatan Desa dan Ekowisata **BALI**



Lembaga Penelitian
Universitas Warmadewa

Editor
I Ngurah Suryawan

*Kontestasi Penguatan
Desa dan Ekowisata*

BALI

Editor
I Ngurah Suryawan

Pustaka Larasan
2021

Kontestasi Penguatan Desa dan Ekowisata Bali

Editor:

I Ngurah Suryawan

Penulis:

I Wayan Runa

I Wayan Gede Suacana

Anak Agung Inten Mayuni

Anak Agung Gede Raka

I Made Sumada

Rima Kusuma Ningrum

Made Indra Wijaya

I Nengah Muliarta

I Ngurah Suryawan

I Made Suwitra

Ni Made Jaya Senastri

I Ketut Kasta Arya Wijaya

I Gusti Agung Putu Eryani

I Made Astu Mahayana

Desak Gde Dwi Arini

I Wayan Wesna Astara

Putu Ayu Sriasih Wesna

Pracetak:

Slamat Trisila

Penerbit:

Pustaka Larasan

(Anggota IKAPI Bali)

Jalan Tunggul Ametung IIIA/11B

Denpasar, Bali, Indonesia

Pos-el: pustaka.larasan@gmail.com

Ponsel: 0817353433

Bekerja sama dengan
Lembaga Penelitian (LEMLIT)
Universitas Warmadewa

Cetakan Pertama:

2021

ISBN 978-623-6013-35-9



SAMBUTAN

Rektor Universitas Warmadewa

Om Swastyastu,

Selaku rektor merasa bangga dengan usaha yang dilakukan oleh Lemlit untuk selalu berpacu dalam mutu dan peningkatan kinerja melalui penerbitan buku. Saya menyambut baik terbitnya Book Chapter II ini yang masih melanjutkan tema "Kontestasi Penguatan Desa dan Ekowisata Bali." Tema ini menjadi sangat relevan karena mampu mencerminkan ciri khas sebagai unggulan yang dikembangkan di Warmadewa, yaitu dengan meramu hukum adat sebagai *folk law* dengan konsep ekowisata dalam Renstra Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Warmadewa (Unwar).

Buku ini sekaligus sebagai luaran intergrasi antara Penelitian, Pengabdian, dan Pendidikan. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa dalam mata kuliah di S1, S2, dan S3, birokrat dalam menyusun kebijakan, Prajuru Adat dalam meningkatkan posisi tawarnya berhadapan dengan para *out sider*, awak media, masyarakat umum yang peduli dengan penguatan desa adat. Isi buku ini juga memberi antaran konsep dan telaah analitik terhadap makna "penguatan desa adat" dari berbagai sudut keilmuan dan bidang sesuai kompetensi kelimuan penulisnya baik dalam perspektif edukasi, konservasi, pemberdayaan, lingkungan, dan indek kepuasan masyarakat.

Sebagai Rektor akan selalu mendorong adanya usaha setiap dosen Warmadewa yang menerbitkan hasil pemikirannya dalam bentuk buku, baik secara individual maupun secara berkelompok. Baik dalam kelompok bidang ilmu, atau multibidang ilmu, baik dalam satu prodi dalam satu fakultas maupun antarprodi dalam satu fakultas atau di luar fakultas atau dalam universitas atau di luar universitas. Bahkan sangat diharapkan bahwa penerbitan



buku bagi dosen Warmadewa dapat terus ditingkatkan. Lebih dari itu, setiap terbitan buku sebaiknya segera diikuti dengan pencatatan HKI-nya.

Terima kasih saya sampaikan kepada para penulis naskah, editor, penerbit, dan Lemlit yang sudah menginisiasi penerbitan buku II secara melembaga. Bagi dosen lain diharapkan dapat termotivasi merancang tulisannya agar dapat diterbitkan dalam episode berikutnya. Salam sehat dan salam sukses untuk karya-karya dosen Warmadewa dalam meningkatkan kinerja lembaga.

Denpasar, Agustus 2021

Prof.dr. Dewa Putu Widjana, DAF&E.Sp.Park.

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan, kerana dengan karuniaNya buku yang mengusung "Penguatan Desa Adat" edisi II dapat diterbitkan yang berisi beberapa naskah kajian sebagai *book chapter* dalam perspektif ekowisata yang diadakan setiap tahun untuk dijadikan referensi dalam mata kuliah Ekowisata sebagai penciri dan keunggulan untuk daya saing.

Penguatan desa adat tidak hanya diwacanakan apalagi disimbulkan dengan megahnya Gedung MDA, tetapi terus diupayakan secara empiris dari berbagai aspek oleh semua pihak, sehingga penguatan tidak diorientasikan sebagai "pencitraan" atau untuk sebuah kepentingan lebih-lebih kepentingan politik. Oleh karena itu, masing-masing komponen masyarakat dapat berperanserta dalam penguatan Desa Adat. Seluruh naskah dalam buku ini mengkritisi peran kelembagaan dan Pemerintah Daerah yang menyatakan komit dalam penguatan, sehingga argumentasi yang disampaikan dapat mendukung sebagai penguatan atau menilai implikasi dari perbuatan hukum dan kebijakan yang pada kenyataan dapat melemahkan. Desa Adat dengan identitas sebagai desa **otonom** dan **otohton** wajib untuk dipertahankan berhadapan dengan kekuasaan lain agar tetap memiliki daya tawar. Dari hasil amatan sampai saat ini menunjukkan bahwa desa adat ada dalam intervensi terutama dari aspek kekuasaan "supra desa" sehingga tema "Penguatan Desa Adat" dalam *Bookchapter* masih relevan.

Para akademisi Warmadewa melalui pemikiran kritisnya akan memberikan berbagai argumentasi dari berbagai sudut pandang kompetensi keilmuannya dengan satu visi, yaitu "penguatan" untuk membedah berbagai pernyataan, kebijakan, perbuatan hukum para *out sider* terhadap desa adat. Tujuannya adalah memberikan kajian akademik yang dapat dijadikan dasar terhadap desain kebijakan, seperti merevisi dan/atau penyusunan kebijakan, pengukur efektivitas antara pernyataan dan implementasi, menyadari implikasi atas perbuatan hukum

dan pengadmistrasian, dan intervensi melalui hukum negara terhadap kewenangan desa adat yang otonom.

Marwah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Bali Nomor 4 Tahun 2019 sebagai hukum negara adalah dalam penguatan desa adat. Namun perlu disadari bahwa norma dalam Perda masih ada yang inkohenrensi dan berimplikasi pada penciptaan peluang melemahkan desa adat, seperti yang sudah terjadi di beberapa desa adat di Gianyar, Karangasem, Jembrana, Buleleng, dan Bangli yang dapat menimbulkan konflik sosial. Wacana “pengukuhan” oleh MDA dapat diinterpretasikan merupakan intervensi terhadap eksistensi pemilihan Bendesa Adat yang secara *otohton* menjadi otonomi desa adat, seperti dalam kasus penerbitan Surat Edaran (SE) oleh Majelis Desa Adat (MDA) dimanfaatkan untuk menganulir sah dan tidak sahnya *ngadegang* Bendesa Adat. Sedangkan secara otonom dan *otohton* masalah *ngadegang* Bendesa Adat menjadi otonomi desa adat yang sudah ditegasi dalam *awig-awig* setiap desa adat. Demikian pula struktur kepengurusan *prajuru* desa sebagai pembawaan sejarahnya sesuai klasifikasi desa adatnya, sehingga perbedaan struktur *prajuru* antara desa adat yang satu dengan desa adat yang lain merupakan identitas “adat”. Oleh karena upaya mengunifikasi struktur *prajuru* adat yang menjadi politik hukum Perda 4/2019 sangat bertentangan dengan identitas adat yang sesungguhnya dan menyimpang dari konsep otonom dan *otohton* yang melekat pada desa adat sebagai masyarakat hukum adat.

Isi buku ini juga dimaksudkan sebagai model terhadap wujud integrasi antara bidang Penelitian, Pengabdian, dan bidang Pendidikan, paling tidak dalam bentuk bahan ajar dosen pada mata kuliah yang diasuhnya. Setiap bahan ajar dapat direferensi untuk menemukan pemikiran baru dengan mengkorespondensi terhadap perkembangan data dalam masyarakat dengan pendekatan analitik. Melalui berbagai pemikiran dalam buku ini, diharapkan dapat membantu *prajuru* desa adat menyikapi segala bentuk intervensi untuk dapat diharmonisasikan dengan identitas desa otonom dan *otohton*.

Dalam upaya meningkatkan kinerja penelitian secara

berkelanjutan Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa dapat menerbitkan beberapa naskah penelitian dosen dalam "Bookchapter" dengan konsisten mengusung ekowisata sebagai ikon unggulan dalam daya saing dan inovasi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan komitmen dari seluruh dosen untuk menyiapkan naskahnya sesuai dengan tema terbitan, namun tetap dapat menghargai ciri penulisnya masing-masing.

Terbitnya buku edisi kedua ini juga diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi seluruh dosen untuk terus berkarya, karena karya dosen tidak akan pernah mati, bahkan selalu hidup untuk diwarisi sebagai referensi menemukan *novelty* sesuai konsep pembangunan semesta. Semoga Lemlit mampu memberikan kado dalam setiap Dies Universitas Warmadewa yang dirangkai dengan Wisuda. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini tak lupa disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Para kontributor penulis naskah yang betul-betul siap dengan pencirinya masing-masing untuk mengisi tema "penguatan desa adat".
2. Editor dan dewan editor yang sudah bekerja keras melakukan editing dan koreksi serta kata pengantarnya.
3. Tim IT dan administrasi yang selalu siap melakukan penyiapan segala keperluan tindak lanjut kegiatan.
4. Rektor Universitas Warmadewa dan jajarannya yang selalu memacu peningkatan kinerja melalui mutu;
5. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali yang selalu mendukung pendanaan dan fasilitas fisik.
6. Penerbit yang sudah bersedia bekerja sama dalam penerbitan buku ini.
7. Semua pihak yang telah membantu melancarkan usaha dan rencana ini sampai pada hasil.

Denpasar, Agustus 2021
Universitas Warmadewa
Lembaga Penelitian
Kepala,

Prof.Dr. I Made Suwitra, SH.,MH



PENGANTAR EDITOR

Diantara Cengkraman dan Perubahan: Kontestasi Penguatan Desa dan Ekowisata Bali

Pelaksanaan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara yang menjadi bagian dari Kongres Kebudayaan Desa pada Juni - Juli 2020 memberikan pekerjaan rumah yang menantang di tengah pandemi Covid-19. Tantangan tersebut berkaitan dengan transformasi yang dialami oleh desa-desa di Indonesia dengan karakteristik dan kekayaan yang luar biasa. Desa-desa di Nusantara telah memiliki pengalaman yang kaya dalam merespon perubahan, sekaligus juga berjuang menghadapi kekuatan supra-desa yang selalu berhasrat untuk menguasai.

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara dilakukan secara daring ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi terkini pada 19 sub-kultur desa di Indonesia. Membaca kembali kehidupan-kehidupan di desa-desa sub-kultur, dengan demikian berarti merayakan warna-warni kebudayaan Nusantara. Di tengah kompleksitas persentuhan budaya dunia, masyarakat harus terus menghidupkan serta menguatkan kebudayaan Indonesia.

Dalam panduan diskusinya, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara melihat bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal sekarang ini terbilang masih sangat minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Budaya lokal juga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, selagi tidak meninggalkan ciri khas dari budaya aslinya. Kurangnya pembelajaran budaya merupakan salah satu sebab dari mudarnya budaya lokal bagi generasi muda. Oleh karena itu, pembelajaran tentang budaya, harus ditanamkan sejak dini. Namun sekarang ini banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya lokal. Hal ini dibuktikan dengan

dalam setiap rencana pembangunan pemerintah, bidang sosial budaya masih mendapat porsi yang sangat minim. Padahal melalui pembelajaran budaya, kita dapat mengetahui pentingnya budaya lokal dalam membangun budaya bangsa serta bagaimana cara mengadaptasikan budaya lokal di tengah perkembangan zaman, yaitu era globalisasi (Sedyawati, 2006: 28; ToR Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, 2020).

Kondisi yang ambigu ini tidak hanya dialami oleh desa, tetapi juga keseluruhan negara bangsa yang bergerak menuju perubahan. Oleh sebab itulah, sangatlah diperlukan usaha-usaha untuk memikirkan dan sekaligus merumuskan berbagai kompleksitas kebangsaan tersebut dengan perspektif dari desa. Kongres Kebudayaan Desa adalah upaya untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan Nusantara.

Cengkraman dan Perubahan

Desa dengan wilayah dan seluruh sumber daya yang dimilikinya memiliki sejarah panjang pencengkraman yang dilakukan oleh kekuasaan. Pada masa Orde Baru, dalam bingkai birokratisasi negara, terjadi pergeseran makna pamong desa dari pamong yang populis menjadi perangkat desa yang birokratis dan tidak lagi berakar dan berpihak kepada masyarakat. Pamong menjadi tangan-tangan negara yang membebani dan mengendalikan masyarakat. Desa kemudian berubah menjadi sekadar kepanjangan tangan negara, dan bukan lagi tempat bagi warga untuk membangun komunitas bersama. Di sini desa tidak lagi *local-self-government*, tetapi sekadar *sebagai local-state government*. Kepala desa tidak lagi sebagai “pamong desa”, tetapi berubah menjadi “fungsiaris negara” (aparatur negara) karena tidak lagi menjadi pengayom atau pemimpin masyarakat desa karena lebih banyak menjalankan tugas negara (Dwipayana dan Sutoro Eko 2003: 5; Cahyono, 2012: 352).

Pada sisi lain, modernisasi dan pembangunan ekonomi yang telah mulai diperkenalkan ke perdesaan semasa Orde

Baru telah membuka perubahan bagi desa, termasuk peluang dan kesempatan bagi lahirnya patron-patron baru di tingkat lokal, di antaranya ialah patron-patron di luar desa (*supra village patron*). Modernisasi juga memengaruhi orientasi masyarakat desa dari komunalistik menjadi individualistik dan materialistik. Hal itu mengubah secara fundamental karakter dari hubungan patrimonial dan hierarkis oleh pertimbangan “kebaikan hati”, proteksi, dan “tuntunan moral” dari patron terhadap client-nya, menjadi hubungan yang lebih rasional atas dasar kalkulasi ekonomi untung-rugi. Namun, terjadinya “rasionalisme” dalam pemikiran masyarakat desa tersebut tidak berarti bahwa hal-hal yang bernuansa “tradisi” dan “perasaan” sama sekali ditinggalkan oleh warga desa (Sayogyo dan Pudjiwati 2002: 24; Cahyono, 2012: 358).

Demokratisasi di perdesaan merupakan kekuatan baru untuk “melawan” praktik-praktik otoritarianisme dan dominasi yang dilakukan oleh elite desa. Sasaran utama demokratisasi desa adalah membuat penyelenggaraan pemerintah desa lebih akuntabel, responsif, dan terlegitimasi; membuat parlemen desa bekerja sebagai institusi perwakilan dan intermediary (artikulasi, agregasi, formulasi kebijakan, dan kontrol); serta memperkuat partisipasi masyarakat terhadap proses pemerintahan dan pembangunan desa. Partisipasi juga berbicara tentang keterlibatan kelompok-kelompok marginal, terutama kaum miskin, yang selama ini terpinggirkan oleh proses politik yang elitis (Tim Lopera 2000: 153; Blair 1998: 21; Cahyono, 2012: 352).

Perubahan yang melaju kencang terjadi di perdesaan, salah satu faktor pentingnya adalah dampak industrialisasi pesat yang terjadi di daerah perkotaan yang berpengaruh kepada daerah perdesaan. Daya tarik industri atas angkatan kerja di daerah perdesaan mengakibatkan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini menyebabkan pemecahan yang layak untuk diambil adalah mekanisasi pertanian. Tentu saja hal ini berdampak luar biasa. Rasionalisasi, mekanisasi, dan komersialisasi sektor pertanian berkembang dengan cepat dan menghasilkan produk pertanian ke seluruh dunia. Petani-petani



dan perilakunya dalam usaha taninya diubah dan diserasikan dengan proses industrialisasi yang berlangsung.

Tjondronegoro (2008) melihat perubahan desa dari narasi kehidupan petani gurem yang serba kekurangan. Merekalah petani gurem yang masih mengharapkan perlindungan dari petani-petani kaya. Hal ini mengakibatkan hubungan patron-klien tidak mudah diubah. Ketergantungan kedua golongan tersebut masih berlangsung karena juga redistribusi tanah dan pengusaannya belum berhasil. Kemandirian petani tergantung dari aset yang dimiliki atau dikuasainya.

Petani pada umumnya adalah makhluk rasional, tetapi bagi petani gurem pertimbangan-pertimbangan rasional dipengaruhi oleh serba kekurangan aset dan modal. Yang dimilikinya adalah tenaga kerja, itu merupakan modal utama, tetapi karena modal tersebut dalam keadaan melimpah, petani menghadapi kesulitan memasarkan tenaga kerjanya sendiri. Ia tawarkan dan jual tenaga kerjanya dengan harga murah, bahkan kadang-kadang di bawah garis kemiskinan, sehingga ia meninggalkan kesan pada kita “mengeksplotasi dirinya.”

Dalam keadaan melarat, petani gurem berbagi kemiskinan, tukar-menukar tenaga kerja dan bergotong-royong yang menjadi lembaga jaminan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, karena ia tahu bahwa ia tak akan dapat memenuhinya dengan usahanya sendiri. Karena itu, solidaritas mencirikan golongan petani gurem selama serba kekurangan aset dan modal, tetapi belum pasti lembaga seperti ini bertahan apabila kebutuhan seperti itu sudah mulai terpenuhi.

Jika mengimajinasikan desa yang mandiri, salah satu aktor yang mesti dilihat adalah para petani dengan kompleksitas permasalahannya. Menggerakkan petani, berarti menumbuhkan dahulu keyakinan dan keinginan pada dirinya. Bukan sekadar menyodorkan teknologi baru, karena belum pasti teknologi baru itu sudah benar-benar layak dan menguntungkan bagi si petani gurem. Semakin lama semakin dihayati bahwa pendekatan massal tidak selalu efektif, malah pendekatan melalui kelompok kecil lebih cepat dan efektif. Kelompok kecil di kalangan masyarakat

petani kecil memang memiliki potensi dan daya hidup yang bersifat demokratis dan sederhana. Orang ingin dihargai juga sebagai pribadi dan hal ini lebih mudah dapat dicapai dalam kelompok kecil. Juga soal kendali sosial sering dalam kelompok kecil lebih efektif (Tjondronegoro, 2008: 8 - 13).

Pandemi Covid-19 ini menjadi momentum arus balik memikirkan peradaban desa dan masa depan desa yang mandiri dan bermartabat. Imajinasi desa yang mandiri pascapandemi berkelidatan dengan titik nadir peradaban kapitalisme global dengan jargon *new-normal*-nya. Desa menjadi ladang eksploitasi pembangunan yang merusak tatanan kehidupan desa. Pandemi Covid-19 ini sebenarnya bisa menjadi momentum menjadikan kerentanan desa sebagai peluang untuk perbaikan. Mengubah kerentanan desa berarti juga menyelamatkan kota. Perubahan peradaban di desa memerlukan transformasi di perkotaan dan relasi yang setara dan saling menguatkan (presentasi Melani Budianta, *Arus Bali: Membangun Peradaban Desa Masa Depan*, 2020).

Denpasar, Agustus 2021
Editor,

I Ngurah Suryawan

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor ____ **iii**

Kata Pengantar ____ **v**

Pengantar Editor ____ **viii**

Penguatan Desa melalui Ekowisata: Narasi Kearifan Lokal dan Modal Budaya ____ **1**

Pengembangan Potensi Ekowisata melalui Penguatan Desa Adat Tenganan Pegringsingan

I Wayan Runa ____ **3**

Ekowisata dengan Kearifan Lokal Tri Hita Karana dan Berbasis Masyarakat Adat di Bali

I Wayan Gede Suacana ____ **15**

Revitalisasi Modal Budaya dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Desa Adat di Bali

Anak Agung Inten Mayuni ____ **37**

Subak Embrio Organisasi Sosial di Bali

Anak Agung Gede Raka dan I Made Sumada ____ **59**

Ekowisata dan Inisiatif Penguatan Desa (Adat) ____ **73**

Peran Mahasiswa dalam Penguatan Desa dengan Perspektif Ekowisata: Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Rima Kusuma Ningrum ____ **75**

Revitalisasi Desa Siaga Aktif dalam Perspektif Bali Bangkit dan Ekowisata: Tantangan dan Keterbatasan

Made Indra Wijaya ____ **93**

Potensi Pengolahan Sampah Sayur dan Buah Menjadi Eco-Enzyme Dalam Upaya Mendukung Pengembangan Desa Ekowisata di Bali
I Nengah Muliarta — 115

Desa Adat Bali pada Masa Pandemi: Catatan-Catatan Refleksi
I Ngurah Suryawan — 133

Kontestasi Ruang dan Sumber Daya Masyarakat Desa — 143

Penguatan Desa melalui Pendekatan Koeksistensi terhadap Pengelolaan Hutan Desa di Bali
I Made Suwitra — 145

Pendekatan Bottom-Up Berbasis Masyarakat dalam Mewujudkan Trimatra Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian Ruang) Berkelanjutan
Ni Made Jaya Senastri — 165

Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air: (Studi Di Desa Wisata Timpag, Kerambitan Tabanan)
I Ketut Kasta Arya Wijaya — 189

Eksistensi Sistem Subak dalam Pengelolaan Air dan Usaha Pengembangan Kawasan Subak sebagai Daerah Pariwisata
I Gusti Agung Putu Eryani — 211

Dinamika Hukum, Bahasa, dan Ekonomi Desa — 233

Dinamika Bahasa Tabu di Tenganan Pegringsingan: Sebuah Desa Wisata di Bali Timur
I Made Astu Mahayana — 235

Penguatan Peran Bendesa Adat Dalam Pengembangan Ekowisata Di Bidang Lembaga Keuangan Milik Desa Adat
Desak Gde Dwi Arini — 253

*Politik Hukum Pariwisata Bali dan Dinamika Desa Adat dalam
Mengelola Desa Wisata Perspektif Perjanjian Build Operate and
Transfer (BOT)*

I Wayan Wesna Astara dan Putu Ayu Sriasih Wesna ____ **277**

Indeks ____ **299**

Tentang Penulis ____ **303**

DINAMIKA BAHASA TABU DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN: SEBUAH DESA WISATA DI BALI TIMUR



I Made Astu Mahayana

Pendahuluan

Desa Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu desa yang terkenal akan budayanya yang unik dan menjadi salah satu destinasi pariwisata di Bali. Desa ini terletak di Kabupaten Karangasem, berdekatan dengan Objek Wisata Candidasa. Sebagian penduduk di Desa Tenganan berprofesi sebagai petani dan pengrajin. Hasil tani dan kerajinan tangan yang dihasilkan oleh penduduk di desa ini tercipta dengan metode tradisional yang diwarisi oleh leluhur mereka. Berdasarkan hal tersebut, Desa Tenganan Pegringsingan ditetapkan sebagai desa Bali asli atau disebut *Bali Aga*, dan menjadi salah satu cagar budaya nasional oleh pemerintah (Astawa *et al.*, 2019).

Di tengah maraknya pengaruh globalisasi saat ini, penduduk Desa Tenganan Pegringsingan bertahan dengan segala identitasnya untuk melestarikan tradisi dan budaya mereka. Dikarenakan penduduk Desa Tenganan merupakan suku Bali asli atau yang biasa disebut *Bali Aga* maka kebudayaan mereka cenderung unik dibandingkan dengan kebudayaan Suku Bali pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari ritual, adat, cara berpakaian, serta bahasa yang mereka gunakan dalam aktivitas social sehari-hari. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Desa Tenganan Pegringsingan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan bahasa Bali pada umumnya. Dialek mereka dapat dikatakan berbeda dengan dialek-dialek bahasa Bali yang ada. Selain itu, mereka juga memiliki norma dan kesantunan bahasa yang memiliki ciri khas yang berbeda.



Seperti masyarakat pada umumnya, penduduk Desa Tenganan Pegringsingan sangat memperhatikan etika dalam berinteraksi sosial. Secara tidak langsung, mereka menerapkan *rule of the game* dalam berkomunikasi agar pesan yang di sampaikan dapat diterima dengan baik dan tidak menyinggung individu lainnya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh AR (2015) bahwa komunikasi yang baik dapat diwujudkan apabila pesan yang disampaikan memiliki komunikasi yang efektif, serta tepatnya penggunaan ungkapan/bahasa agar tidak menimbulkan kesan yang tidak nyaman bagi mitra tutur, seperti mendiskreditkan mereka dengan ungkapan-ungkapan tabu.

Setiap bahasa pastinya memiliki kata-kata yang tabu untuk diucapkan, tidak terkecuali di Desa Tenganan Pegringsingan sendiri. Adapun salah satu keunikan ungkapan tabu dalam bahasa Bali di desa tersebut, seperti *kebo* 'kerbau'. Ungkapan *kebo* merupakan ungkapan yang tabu dalam konteks jika kata tersebut dialamatkan kepada binatang kerbau jantan. Masyarakat menyebut istilah kerbau jantan dengan istilah *jero gede*, karena hewan tersebut merupakan salah satu hewan yang dikeramatkan oleh penduduk Desa Tenganan. Dalam kesehariannya, apabila masyarakat setempat ingin menceritakan bahwa ia baru saja melihat seekor kerbau (jantan), mereka akan berkata *tuni tyang ningalin jero gede* 'tadi saya melihat seekor kerbau (jantan)'. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kata *kebo* merupakan salah satu ungkapan tabu di Desa Tenganan yang tidak boleh sembarangan diucapkan dalam konteks tertentu, begitu pula ungkapan-ungkapan tabu lainnya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Laksana (2009) bahwa dalam kasus tabu, pengucapan ungkapan tabu dapat menimbulkan malapetaka karena sebuah kata dapat memiliki kemanjuran (*efficacy*).

Perlu diketahui bahwa permasalahan penggunaan umpatan atau kata tabu berawal dari pernyataan Patrick (1901) yang mengungkapkan *why do we swear? When we swear? Why do we choose the words we do?* (mengapa dan kapan kita mengumpat? Serta



Gambar 1.1 Situasi Desa Tenganan Pegringsingan



Gambar 1.2 Kerbau atau yang disebut Jero Gede

mengapa kita memilih kata-kata tertentu untuk mengumpat?).¹ Hal ini secara tidak langsung memberikan jawaban bahwa suatu kata/ungkapan termasuk tabu tergantung pada dengan siapa kita bicara dan tempat di mana percakapan tersebut terjadi. Fenomena ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Jay, (2009) bahwa tingkat ofensifitas dan kelayakan sebuah kata tergolong tabu dipengaruhi oleh variable kontekstual dan rasa sensitivitas kita saat mendengar ungkapan tersebut.

Pada umumnya, suatu ungkapan dalam suatu topik tergolong tabu, seperti seks, bagian vital tubuh, dan sebagainya. Di Amerika dan Negara-negara Eropa, ungkapan-ungkapan tertentu yang berkaitan dengan ras, dan agama merupakan salah satu topik yang tergolong tabu. Seperti contoh: *Ohh My God, Jesus Christ, Holyshit* merupakan beberapa ungkapan berkaitan dengan keagamaan yang tidak boleh dikatakan sembarangan. Namun, di Indonesia, khususnya Bali, ungkapan-ungkapan seperti “Ya Allah” atau “Mimih Dewa Ratu” merupakan hal yang tidak tabu untuk diungkapkan. Faktor sosiokultural seperti faktor gender dan norma budaya berpengaruh pada tabu atau tidaknya suatu ungkapan.² Seperti halnya kata *kebo* yang telah dipaparkan di atas merupakan suatu ungkapan yang ditabukan dan tidak boleh dikatakan sembarangan di Desa Tenganan, namun menjadi

1 Jay, T. (2009). The Utility and Ubiquity of Taboo Words. *Perspectives on Psychological Science*, 4(2), 153–161.

2 Schippers, A. F. (2013). *Bad Language in Reality television*. Goteborgs Universitet.

ungkapan yang biasa di wilayah lainnya, termasuk Denpasar.

Penggunaan bahasa tabu dan ungkapan yang digunakan oleh masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan tidak selalu berkesan negatif. Secara tidak langsung hal tersebut dapat menjadi ciri khas atau daya tarik dari Desa Tenganan Pegringsingan yang pada umumnya tidak dapat dijumpai di daerah lain di Bali dan perlu untuk dilestarikan. NKT (Nilai Konservasi Tinggi) didefinisikan sebagai proses lengkap dalam mengidentifikasi daerah yang bernilai konservasi dan pengembangan manajemen dan melakukan monitor terhadap rencana untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diidentifikasi dipertahankan atau ditingkatkan (Stewart *et al.*, 2008). Dalam hal ini, nilai konservasi dianggap penting dalam hal aspek pelestarian budaya yakni bahasa lokal sebagai budaya lokal yang memiliki hubungan erat dengan pengembangan ekowisata.³

Berdasarkan permasalahan yang dibahas diatas, penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan mengingat ungkapan-ungkapan tabu merupakan bagian dari bahasa yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pelestarian budaya lokal. Dalam hal ini ungkapan tabu yang berada di Desa Tenganan Pegringsingan mengandung pesan moral dan nilai-nilai kebaikan atau nilai kearifan yang unik dan perlu dilestarikan.

Kajian Teoretis

Ungkapan tabu merupakan ungkapan yang tidak boleh diucapkan secara sembarangan, namun hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena ungkapan-ungkapan tersebut merupakan bagian dari kebahasaan yang memiliki kaitan erat dengan social dan budaya. Penelitian tentang ungkapan tabu atau umpatan dalam bahasa Bali sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Namun penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada jenis, bentuk, dan referensi ungkapan-ungkapan tabu. Penelitian tentang konteks penggunaan ungkapan

3 <https://mfarmer.co/id/lessons/nilai-konservasi-tinggi-high-conservation-value-nkt/>

tabu dalam bahasa Bali belum pernah dikaji atau dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang jenis dan referensi, serta motif penggunaan ungkapan-ungkapan tabu dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Dewi dkk. (2017) menganalisis tentang umpatan (*swearing*) yang digunakan oleh masyarakat di Desa Cempaga. Penelitian ini berfokus pada bentuk dan fungsi umpatan yang terdapat pada komunitas tutur masyarakat Desa Cempaga. Serupa dengan penelitian Dewi dkk. (2017), penelitian Dewipayani *et al.*, (2017) menganalisis bentuk dan fungsi umpatan dalam bahasa Bali. Namun, sumber data dalam penelitian ini adalah anak-anak muda di Nusa Penida. Berdasarkan kedua hasil penelitian, ditemukan bahwa penggunaan umpatan dan ungkapan tabu tidak hanya bersifat negatif, namun memiliki manfaat positif seperti hiburan, penghilang stress, dan sebagai bahan candaan. Selain itu, ditemukan delapan fungsi utama dalam umpatan, yaitu untuk menarik perhatian, untuk memberikan katarsis, untuk memprovokasi, untuk menciptakan identitas interpersonal, integratif, agresif, regresif, dan penekanan.

Mahayana dkk. (2020) menganalisis tentang bentuk, jenis, dan motif penggunaan ungkapan-ungkapan tabu di Kota Denpasar. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat tiga motif dan sepuluh jenis ungkapan tabu di Kota Denpasar. Penelitian ini memberikan gambaran awal bagaimana masyarakat Bali dalam berkomunikasi secara informal dan jenis-jenis ungkapan tabu apa saja yang ditemukan, serta mengapa mereka menggunakan ungkapan tabu tersebut.

Landasan Teori

Seperti yang sudah dijelaskan pada subchapter sebelumnya, bahasa/kata/ungkapan tabu merupakan bagian dari bahasa yang tak dapat dipisahkan dalam aktivitas sosial masyarakat dalam berkomunikasi. Penelitian ini menerapkan teori Sosiolinguistik, Ungkapan Tabu, dan Konteks yang akan dibahas lebih detail pada *subchapter* berikut.

1) Sociolinguistik

Eksistensi ungkapan tabu serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dapat berbeda (bervariasi) dari satu daerah ke daerah lainnya. Dapat dikatakan, tidak ada ungkapan yang tabu bagi semua orang dalam situasi dan waktu tertentu. Leksikon-leksikon tabu yang ada saat ini dapat berubah atau kehilangan fungsi tabunya, atau bahkan sebaliknya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat berhubungan dengan Sociolinguistik.

Berbicara mengenai bahasa dan masyarakat, sociolinguistik merupakan bagian utama dari bahasa dan masyarakat yang tidak bisa kita sampingkan. Wardaugh (2006: 13), menyatakan bahwa sociolinguistik adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat. Ilmu ini mengkaji lebih dalam tentang struktur bahasa serta fungsinya yang diterapkan di masyarakat. Holmes (2013: 1), menambahkan bahwa fokus utama studi sociolinguistik adalah mendeskripsikan pandangan masyarakat dalam berinteraksi pada suatu konteks sosial yang berbeda-beda, serta menjelaskan penggunaan bahasa dalam kehidupan social masyarakat dalam berkomunikasi. Sebagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi pada kelompok masyarakat, dapat dikatakan bahwa komunikasi tersebut bersifat kontekstual. Selain itu, pesan yang disampaikan berpacu pada konteks social serta setting (tempat) komunikasi itu terjadi. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat bahwa kelompok masyarakat merupakan sebuah perspektif inklusif, sebab antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya tidak akan mendiskusikan hal yang sama. Diskusi yang terjadi menggunakan medium bahasa. Bahasa menurut Wardaugh (2006:1) adalah sesuatu yang diungkapkan dan dibicarakan oleh suatu kelompok tertentu.

Sebagaimana halnya kelompok tertentu membahas hal/topik tertentu sesuai dengan latar belakang masyarakat tersebut, beberapa aspek di luar komunikasi akan muncul saat mereka berinteraksi. Seperti yang dikatakan oleh Chaika (1982: 2), bahwa nilai sosial, situasi, kepercayaan, serta hal lainnya memengaruhi pembicara dalam membentuk komunikasi dan menentukan gaya bicara yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam



sebuah interaksi social. Seperti contoh penggunaan bahasa formal dalam sebuah komunitas dalam rangka mencapai kebutuhan social, karena memang cara tersebut dianggap ampuh dalam berkomunikasi pada komunitas tersebut. Di sisi lain, terdapat pula sebuah komunitas masyarakat yang menggunakan bahasa informal, seperti bahasa tabu. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan sebuah identitas serta memperkuat makna bahasa yang mereka ungkapkan.

2) Ungkapan Tabu

Istilah tabu merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Secara umum, tabu merupakan yang dianggap suci, tidak boleh disentuh atau diucapkan karena dianggap sebagai suatu pantangan atau larangan. Istilah-istilah tabu ini sendiri dapat diuraikan sebagai kata-kata yang menyakitkan hati tau menghina, mengejutkan atau tidak sopan, atau kasar. Istilah tabu ini digunakan seseorang penutur baik secara personal maupun interpersonal.

Kata tabu berasal dari bahasa Tongan 'tabu' yang berarti 'to forbid' atau 'forbidden' 'dilarang/larangan' (Allan & Burridge, 2006). Sebuah ungkapan dikatakan tabu berdasarkan norma dan kesepakatan masyarakat pada komunitas social tertentu. Seperti yang diungkapkan Whorf dalam Wardaugh (2006: 221):

Different societies may value certain things and do them in a certain way, yet almost all of the societies that exist in this world have the same requirements of the categorization of good and bad language.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikatakan bahwa tidak semua kata merupakan ungkapan tabu, meskipun sebagian besar komunitas masyarakat menyepakati hal-hal tertentu yang merupakan ungkapan tabu, misalnya topik yang berkaitan dengan seks, anggota tubuh, dll.

Napoli & Hoeksema (2009) menyebutkan terdapat beberapa topik yang dianggap tabu, seperti *religion, sex, health, bodily excretions, insulting physical attributes and racial/ethnic groups, extreme political*, dan *name calling*. Di sisi lain, Jay (1992: 2-9), menyebut istilah tabu sebagai *dirty words* dan mengklasifikasikannya menjadi

sepuluh jenis, yaitu *cursing*, *profanity*, *blasphemy*, *taboo*, *obscenity*, *vulgarity*, *slang*, *epithets*, *insults and slurs*, dan *scatology*.

Pada momen tertentu, kata-kata tabu mungkin dapat ditoleransi oleh sebagian orang, tetapi sebagian orang lain mungkin tidak. Kadang, penggunaan ungkapan tabu atau mengumpat '*swearing*' menunjukkan bahwa penutur memiliki, atau ingin memiliki, hubungan pribadi yang dekat dengan orang lain. Di sisi lain, mengumpat cenderung bersifat emotif, kasar, dan dapat memunculkan kesan tidak menyenangkan. Ljung (2011), menggolongkan umpatan menjadi dua jenis, yaitu *swearing words* 'kata-kata umpatan' dan *non swearing words* 'kata-kata non umpatan'. Ia menambahkan bahwa ungkapan-ungkapan tabu belum tentu bias dikatakan sebagai umpatan, namun, segala bentuk dan kata-kata umpatan sudah pasti merupakan ungkapan tabu, seperti contoh di bawah berikut.

- a) We living in *hell*. Trapped
- b) Go straight to *hell*!

Berdasarkan contoh di atas, kata *hell* pada kalimat (a) mempertahankan arti aslinya yang menunjukkan interpretasi metaforis "sesuatu yang tidak menyenangkan" atau "tempat yang tidak menyenangkan". Sedangkan kata *hell* pada kalimat (b) merupakan sebuah umpatan yang bersifat eksplisit.⁴

3) Konteks

Dalam peristiwa tutur terjadi interaksi verbal yang selalu melibatkan faktor-faktor yang ada di luar bahasa, antara lain: penutur, lawan tutur, pokok pembicaraan serta waktu tempat bicara, seperti yang dikemukakan oleh Fish (dalam Surana, 2017: 87), dalam pernyataan "*Who speak, What language, to whom, when and what end*".

Hymes (dalam Brown & Yule, 1983: 38) menjelaskan mengenai konteks situasi, yaitu pembicara/penulis (*addressor*),

4 Pratama, A. D. Y. (2017). The Functions Of Taboo Words And Their Translation In Subtitling: A Case Study In "The Help." *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 2(2), 350. <https://doi.org/10.22225/jr.2.2.65.350-363>

pendengar/pembaca (*addresse*), topik pembicaraan (*topic*), saluran (*channel*), kode (*code*), bentuk pesan (*message form*), peristiwa (*event*), dan tempat/waktu (*setting*). Lebih lanjut Hymes (dalam Junaidi & Wardani, 2019: 5) merumuskan merumuskan ihwal faktor-faktor penentu dalam peristiwa tutur dalam konteks situasi yang tidak jauh berbeda dengan penjelasan sebelumnya, melalui akronim SPEAKING. Tiap-tiap fonem mewakili faktor penentu yang dimaksudkan

- (S) *Setting and scene*, yaitu latar dan suasana. Latar (*setting*) lebih bersifat fisik, yang meliputi tempat dan waktu terjadinya tuturan. Sementara *scene* adalah latar psikis yang lebih mengacu pada suasana psikologis yang menyertai tuturan.
- (P) *Participants*, peserta tuturan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam percakapan, baik langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang berkaitan dengan partisipan, seperti usia, pendidikan, dan latar sosial juga menjadi perhatian.
- (E) *Ends*, hasil, yaitu hasil atau tanggapan dari suatu pembicaraan yang memang diharapkan oleh penutur (*ends as outcomes*), dan tujuan akhir pembicaraan itu sendiri (*ends in view goals*).
- (A) *Act sequence*, pesan/amanat, terdiri dari bentuk pesan (*message form*) dan isi pesan (*message content*).
- (K) *Key*, meliputi cara, nada, sikap, atau semangat dalam percakapan. Semangat percakapan, misalnya: serius, santai, akrab, dan sebagainya.
- (I) *Instrumentalities* atau sarana, yaitu sarana percakapan. Maksudnya dengan media apa percakapan tersebut disampaikan. Misalnya: dengan cara lisan, tertulis, surat, radio, dan sebagainya.
- (N) *Norms*, menunjuk pada norma atau aturan yang membatasi percakapan. Misalnya, apa yang boleh dibicarakan dan tidak, bagaimana cara membicarakannya: halus, kasar, terbuka, dan sebagainya.
- (G) *Genres* atau jenis, yaitu jenis atau bentuk wacana. Hal ini langsung menunjuk pada jenis wacana yang disampaikan. Misalnya: telepon, koran, puisi, ceramah, dan sebagainya.

Pembahasan

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, dinamika bahasa tabu yang terdapat di Desa Tenganan Pegringsingan dapat diklasifikasikan menjadi tujuh jenis, di antaranya jenis aktivitas, hewan, bagian organ tubuh, *excrement*, sakral, makian, dan pronomina. Setiap ungkapan tabu tersebut masih bertahan sampai saat ini dan tidak selalu bersifat negatif. Kata tabu tersebut dapat bersifat positif apabila digunakan oleh komunitas guyub tutur Desa Tenganan Pegringsingan dalam hal memperlakukan hubungan persahabatan dan kekeluargaan. Dalam temuan di lapangan ditemukan bahwa bahasa tabu di Desa Tenganan Pegringsingan memiliki empat konteks, yakni konteks *setting* 'tempat', *participant* 'pembicara dan pendengar', *ends* 'tujuan', serta *norms* 'norma'. Pembahasan mengenai dinamika bahasa tabu beserta jenis-jenisnya dipaparkan pada subbab berikut.

1. Ungkapan Tabu Berjenis Aktivitas

Berdasarkan jenis aktivitas, ditemukan beberapa kata yang ditabukan di daerah Tenganan Pegringsingan. Salah satu ungkapan tabu yang berjenis aktivitas adalah ungkapan *nginem* yang berarti 'minum'. Dalam hal ini, ungkapan tersebut tidak boleh diungkapkan secara sembarangan. Faktor *setting* dan *participant* menjadi aspek kapan dan di mana ungkapan ini boleh diungkapkan. Jika diucapkan oleh komunitas tutur pemuda Tenganan Pegringsingan kata ini tidak menjadi tabu. Terlebih lagi jika mereka memiliki hubungan yang dekat satu sama lain di antara komunitas tersebut. Selain kata *nginem*, kata *nyegseg* juga merupakan ungkapan yang tabu di Desa Tenganan Pegringsingan. Kata *nyegseg* memiliki makna 'makan' dalam konteks kasar. Kata yang memiliki makna serupa dengan *nyegseg* yakni *manted*. Kata tersebut juga merupakan ungkapan tabu berjenis aktivitas. Dua kata aktivitas 'makan' tersebut pada umumnya hanya digunakan oleh komunitas tutur pemuda di Desa Tenganan Pegringsingan. Dengan kata lain, jika kata tersebut diungkapkan oleh satu sama lain di komunitas tersebut, ungkapan tersebut tidak menjadi ungkapan tabu, melainkan ungkapan biasa yang bersifat candaan, dan secara tidak langsung menandakan bahwa mereka



mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

Kata lain yang tergolong tabu berjenis kata aktivitas yakni *nyangklik* yang bermakna ‘bersenggama’. Sedikit berbeda dengan ungkapan tabu aktivitas makan dan minum di atas, ungkapan ini agak jarang digunakan oleh komunitas pemuda di Desa Tenganan Pegringsingan, Selain kata-kata yang telah disebutkan di atas, terdapat satu kata yang ditabukan dan termasuk dalam jenis kata aktivitas, yakni *melud*. Makna dari kata *melud* sendiri yaitu ‘tidur’. Kata *melud* biasanya ditemukan dalam suatu percakapan apabila pembicara dan pendengar memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Seperti contoh anak muda yang sedang berbicara kepada seorang kakek dalam percakapan berikut.

Kak, be melud, Kak?
(Kek, sudah tidur tadi?)

Dalam percakapan tersebut, ungkapan tersebut tidak tergolong tabu walaupun dialamatkan kepada seseorang yang lebih tua dari si pembicara. Dalam hal ini, si pembicara dan si pendengar (kakek) memiliki hubungan yang dekat, sehingga kata tersebut tidak memiliki makna negative. Jika ditinjau dari aspek *setting*, kata tersebut masih umum digunakan apabila dalam suatu percakapan bertempat di suatu rumah atau tempat berkumpul yang situasinya tergolong santai dan tidak serius. Berbeda halnya jika mereka berada dalam suatu paruman yang sifatnya tergolong formal dan serius. Dalam paruman tersebut, seluruh masyarakat, termasuk pemuda di desa diwajibkan menjaga etika dan sopan santun ketika paruman tersebut berlangsung. Ungkapan-ungkapan tabu seperti yang sudah dijelaskan di atas sebaiknya dihindari penggunaannya dalam forum tersebut.

‘Berebut’ atau dalam bahasa Bali disebut *megarang* merupakan ungkapan tabu berjenis aktivitas yang tergolong tabu di Desa Tenganan Pegringsingan. Pada umumnya, kata *megarang* merupakan ungkapan hal yang biasa diungkapkan di daerah lain, terutama di Kota Denpasar. Namun berbeda dengan di Desa Tenganan Pegringsingan, kata tersebut tergolong tabu dan negative jika diungkapkan secara sembarangan, terlebih

jika merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada contoh di bawah berikut.

Eeehh! De megarang!!
(Hei! jangan rebutan!!)

Kata *megarang* hanya boleh ditujukan kepada hewan seperti contoh pada kalimat “*nasi e garang buyung*” yang memiliki makna “nasinya direbut lalat/dicari lalat”. Dalam hal ini, masyarakat pada umumnya tidak menggunakan kata *megarang* jika ingin memberikan informasi tentang merebut sesuatu. Kata umum yang digunakan dalam mengungkapkan ‘rebutan’ adalah *merebut*. Ungkapan tersebut lebih berterima dan sesuai norma jika digunakan di desa ini.

2. Ungkapan Tabu Berjenis Hewan

Pada bahasa tabu dalam jenis hewan terdapat beberapa kata yang ditemukan di Desa Tenganan Pegriingsingan; di antaranya *bojog*. Kata *bojog* yang merujuk kepada ‘monyet’ termasuk salah satu ungkapan tabu. Terlebih jika ungkapan tersebut diucapkan dalam suatu kegiatan formal dalam aspek *setting*. Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan bahwa saat *pesangkepan* atau pertemuan pemuda Desa Tenganan Pegriingsingan atau yang dikenal dengan *Pesangkepan Daha*, mereka dituntut untuk menjaga etika dan sopan santun ketika kegiatan berlangsung. Mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara kasar, mengumpat, dan mengutarakan sesuatu secara sembarangan. Salah satu contohnya adalah ketika mereka melihat seekor kera yang datang mengambil sebuah makanan. Para pemuda menyiasati hal tersebut dengan menghindari menggunakan kata *bojog* dengan mengubahnya dengan kata *bo*. Secara morfologis, kata *bojog* menjadi *bo* merupakan proses pembentukan kata baru yang diklasifikasikan sebagai *clipping* yang berarti memotong suatu suku kata dalam suatu kata. Dengan demikian mereka akan mengutarakan informasi tersebut dengan cara:

Melahang wenten bo masuk!
(Awas, ada monyet masuk ke rumah)

Perlu diketahui bahwa ungkapan di atas merupakan ungkapan yang umum di desa tersebut. Kata *bojog* merupakan salah satu hewan yang penggunaannya yang tidak boleh diucapkan sembarangan, karena mereka percaya bahwa apabila kata tersebut diungkapkan sembarangan, maka mereka akan mendapatkan pasangan hidup yang berupa dan bertingkah laku seperti binatang, dalam hal ini adalah *bojog* ‘monyet’.

Ungkapan tabu berjenis hewan lainnya adalah *kaung* ‘babi jantan’. *Kaung* dalam bahasa Tenganan bermakna ‘pejantan babi’. Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan sangat menabukan dan menghindari pengucapan kata tersebut, terutama apabila diucapkan pada saat pertemuan atau *pesangkepan*. Oleh karena itu mereka menyiasati ungkapan *kaung* tersebut dengan eufemisme *truna*. Dengan kata lain, kata *kaung* merupakan sebuah ungkapan tabu di Desa Tenganan dalam konteks *norms*, karena kata tersebut menjadi tabu jika diungkapkan di manapun dan dalam situasi apapun dalam komunitas tutur Desa Tenganan Pegringsingan.

Serupa dengan kata *bojog*, ungkapan tabu berjenis binatang, *sampi* ‘sapi’ juga ditabukan karena menurut kepercayaan masyarakat Tenganan Pegringsingan, sapi merupakan hewan yang disucikan. Dalam kepercayaan masyarakat agama Hindu, sapi adalah lambing dari Ibu Pertiwi yang memberikan kesejahteraan kepada seluruh umat di bumi. Oleh karena itu, mereka menyiasati penggunaan kata *sampi* dengan *sam* yang merupakan proses pemotongan satu suku kata akhir yang membentuk satu kata baru. Namun, ungkapan tersebut tidak selamanya tabu atau bersifat negatif apabila digunakan oleh kalangan muda yang melontarkan ungkapan tersebut ke sesama kalangan muda di desa; seperti contoh:

“e I sampi teke!”

Berdasarkan hasil wawancara, ungkapan tersebut biasa digunakan dalam konteks candaan, dan justru dapat meningkatkan kekerabatan (*goodwill*). Selain itu dikatakan bahwa dalam suatu paruman, ungkapan tersebut sebaiknya

dihindari karena mereka percaya apabila ungkapan tersebut dapat mencelakai si pembicara itu sendiri. Namun, jika berada di luar paruman, ungkapan tersebut boleh diungkapkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tabu tidaknya ungkapan *sampi* tersebut dipengaruhi oleh aspek *setting* dan *participant* dalam sebuah diskusi atau percakapan.

3. Ungkapan Tabu Berjenis Bagian Organ Tubuh

Selain jenis kata tabu diatas, terdapat jenis kata lain yang ditabukan di Desa Tenganan Pegringsingan yakni jenis bagian organ tubuh. Terdapat beberapa kata yang menyangkut soal organ tubuh yang didapati, diantaranya seperti *lengget*. Makna dari kata *lengget* sendiri yakni alat kelamin pria. Kata tersebut tidak boleh diucapkan sembarangan. Kendati demikian, ungkapan tersebut jika diucapkan dalam konteks candaan, maka ungkapan tersebut menjadi positif dalam rangka mempererat kejerabatan. Selain kata *lengget* terdapat jenis kata serupa yang ditabukan dan tidak diperbolehkan diucapkan sembarangan, yakni *momok* yang berarti 'alat kelamin wanita'. Seperti contoh:

"e momok e ngenah"

Dalam ungkapan tersebut, pembicara melontarkan kata tersebut kepada keponakannya yang saat itu telah selesai mandi. Dalam hal *participant*, si pembicara memiliki status social yang lebih tinggi dibandingkan pendengar, dalam hal ini keponakannya. Selain itu, si pembicara mengutarakan ungkapan tersebut dengan tujuan candaan semata. Oleh karena itu, seperti ungkapan-ungkapan tabu di desa Tenganan Pegringsingan pada umumnya, ungkapan tersebut merupakan hal yang tabu jika dilihat dari konteks *setting* dan *participant* dalam sebuah wacana atau percakapan.

4. Ungkapan Tabu Berjenis *Excrement*

Menurut *Cambridge English Dictionaries*, *excrement* memiliki makna *the solid waste that is released from the bowels of*

a person or animal atau dalam bahasa Indonesia bermakna limbah padat yang dikeluarkan dari perut manusia atau hewan (kotoran). Dalam bahasa tabu yang terdapat di Desa Tenganan terdapat kata yang masuk dalam jenis *excrement*, adalah *ngendig*. *Ngendig* adalah sebuah aktivitas 'buang air besar'. Tabu tidaknya ungkapan ini dipengaruhi oleh konteks *setting* dan *participant*. Ungkapan tabu ini akan menjadi positif jika diucapkan dan dialamatkan antar kalangan remaja dengan tujuan candaan. Dengan kata lain, mempererat ikatan kekeluargaan antar kaum remaja di Tenganan Pegringsingan.

5. Ungkapan Tabu Berjenis Sakral

Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan sangat menjunjung tinggi nilai kesakralan terutama dalam bahasa. Terdapat kata yang tabu diucapkan sembarangan karena mengandung nilai kesakralan, yakni terdapat enam nama sakral yang pantang untuk sembarangan disebut. Enam nama sakral tersebut diucapkan pada saat masyarakat melakukan upacara *Nganyunang Loka* atau yang bermakna upacara memutar bumi. Masyarakat Desa Tenganan percaya bahwa upacara ini sangat penting dilakukan demi menjaga keseimbangan bumi. Ungkapan ini dapat menjadi nilai jual dalam bidang ekowisata budaya.

6. Ungkapan Tabu Berjenis Makian

Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan juga memiliki makian yang khas dan berbeda dari daerah lain di Bali. Bila daerah lain di Bali mengenal kata *bangsat* atau *nas kleng*, maka masyarakat Tenganan menggunakan kata *kawah* dan *kawah incuk*. Kata *kawah* memiliki persamaan makna dengan kata 'brengeks' sedangkan *incuk* tidak memiliki makna yang spesifik. Ungkapan ini tentunya ditabukan bila dilontarkan oleh anak muda ke orang yang lebih tua atau dilontarkan pada saat acara resmi di desa seperti *paruman*. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat situasi dan kondisi dalam penyebutan ungkapan ini.

7. Ungkapan Tabu Berjenis Pronomina

Pronomina atau *pronoun* merupakan jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Adapun ungkapan tabu berjenis pronominal di Desa Tenganan Pegringsingan contohnya *engko* yang dalam bahasa Indonesia berarti 'kamu'. Kata *engko* dianggap tidak sopan bila ditujukan kepada orang yang lebih tua. Namun pada umumnya kata *engko* dapat digunakan kepada orang yang sebaya. Selain kata *engko*, kata *wake* juga ditabukan jika dialamatkan kepada yang lebih tua. Kata *engko* tidak menjadi tabu untuk diarahkan ke orang tua bila ditambahkan kata tertentu seperti misalkan bila mengatakan kata *engko* ke kakek maka harus ditambah kata *ki* menjadi *engko ki*.

Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis data beserta penjelasannya yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis kata tabu yang terdapat di Desa Tenganan Pegringsingan diantaranya ungkapan tabu berjenis aktivitas, hewan, bagian organ tubuh, *excrement*, sakral, makian, serta berjenis pronomina.

Selain jenis-jenis yang tertera di atas, ditemukan juga konteks-konteks bahasa tabu yang terdapat di Desa Tenganan Pegringsingan, diantaranya seperti *setting and scene* 'latar dan suasana', *participants* 'peserta tuturan', *ends* 'tujuan', serta *norms* 'norma'.

Melalui hasil analisis data yang telah dipaparkan pada beberapa bab di atas, dapat juga disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan sangat menjunjung tinggi norma kesopanan. Oleh karena itu, hanya sedikit ditemukannya data bahasa tabu yang terdapat di Desa Tenganan Pegringsingan beserta konteksnya yakni berjumlah enam belas kata tabu.

Ungkapan – ungkapan tabu tersebut akan menjadi positif apabila diucapkan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti *setting*, *participant*, tujuan, dan norma. Dengan demikian, ungkapan tabu yang awalnya bermakna negatif dapat berubah menjadi positif. Selain itu, ungkapan – ungkapan tabu yang

terdapat di Desa Tenganan Pegringsingan dapat menjadi nilai pendidikan bagi pembaca/pelajar bahasa bahwa bahasa tabu tidak hanya negatif. Bahasa tabu di Tenganan menjadi suatu budaya dan ciri khas desa karena dapat meningkatkan *goodwill* antara masyarakat setempat. Bahasa tabu daerah Tenganan merupakan bagian dari konservasi bahasa daerah, dan merupakan warisan budaya. Dengan terpeliharanya warisan budaya, maka Desa Tenganan Pegringsingan dapat menjadi desa wisata yg berbasis budaya dan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan. Dengan demikian kajian pelestarian bahasa lokal sebagai bagian dari budaya lokal dan unsur pendidikan yang berkaitan dengan bahasa tabu dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu aspek dalam perkembangan ekowisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, K., & Burridge, K. (2006). *Forbidden Word: Taboo and the Censoring Of Language*. Cambridge University Press.
- AR, A., Juita, N., & Burhanuddin, D. (2015). Ungkapan Tabu dalam Tuturan Peserta pada Acara Indonesia Lawyers Club di Stasiun TV One. *Bahasa Sastra Dan Pembelajaran*, 3(1), 57–68.
- Astawa, I. G., Budiarsa, M., & Simpen, I. W. (2019). The Representation of The Tri Hita Karana Ecosophy in The Awig-awig (Customary Law) Text of Tenganan Pegringsingan Village: Critical Ecolinguistics Perspective. *Journal of Language Teaching and Research*, 10(2), 396. <https://doi.org/10.17507/jltr.1002.23>
- Brown, G., & Yule, G. (1983). *Discourse Analysis*. Cambridge University Press.
- Chaika, E. (1982). *Language: The Social Mirror*. Newbury House Publishers Inc.
- Dewi, M. I. K., Budasi, I. G., & Ramendra, D. P. (2017). An Analysis of Balinese Swear Words Used in Cempaga Village. *Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Undiksha*, 5(2).
- Dewipayani, N. P. A. S., Suarnajaya, I. W., & Suprianti, G. A. P. (2017). Swear Words Used By the Teenagers in Nusa Penida a Descriptive Qualitative Study. *Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Undiksha*, 5(2), 1–11.



- Holmes, J. (2013). *An Introduction to Sociolinguistics* (Fourth). Routledge.
- Jay, T. (1992). *Cursing in America: A Psychological Study of dirty language in The Courts, in The Movies, in The Schoolyards and on The Street*. John Benjamin Publishing Co.
- Jay, T. (2009). The Utility and Ubiquity of Taboo Words. *Perspectives on Psychological Science*, 4(2), 153–161.
- Junaidi, & Wardani, V. (2019). Konteks Penggunaan Bahasa Tabu sebagai Pendidikan Etika Tutur dalam Masyarakat Pidie. *Jurnal Serambi Ilmu*, 20(Maret 2019), 1–17.
- Junaidi, Yani, J., & Rismayeti. (2016). Variasi Inovasi Leksikal Bahasa Melayu Riau di Kecamatan Pulau Merbau. *Jurnal Pustaka Budaya*, 3(1), 1–17.
- Laksana, I. K. D. (2009). *Tabu Bahasa: Salah Satu Cara Memahami Kebudayaan Bali* (Cetakan Pe). Udayana University Press.
- Ljung, M. (2011). *Swearing: A Cross Cultural Linguistic Study*. In *Palgrave Macmillan* (First).
- Mahayana, I. M. A., Suarjaya, A. A. G., & Putri, D. A. D. P. (2020). The use of taboo words in denpasar. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(8), 4623–4633. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I8/PR280479>
- Napoli, D. J., & Hoeksema, J. (2009). The grammatical versatility of taboo terms. In *Studies in Language* (Vol. 33, Issue 3, pp. 612–643). <https://doi.org/10.1075/sl.33.3.04nap>
- Pratama, A. D. Y. (2017). The Functions Of Taboo Words And Their Translation In Subtitling: A Case Study In “The Help.” *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 2(2), 350. <https://doi.org/10.22225/jr.2.2.65.350-363>
- Schippers, A. F. (2013). *Bad Language in Reality television*. Goteborgs Universitet.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Surana. (2017). Aspek Sociolinguistik dalam Stiker Humor. *Lokabasa*, 8(1), 86–100.
- Wardaugh, R. (2006). *An Introduction to Sociolinguistics* Blackwell Textbooks in Linguistics. In *Religion*. Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1353/lan.2003.0268>



INDEKS

A

Abiansemal 218
Amerika (USA) 55, 78, 100, 146,
237
Amlapura 9
Anwari, A. 265, 275
Aquinas, T. 152
Aristoteles 151
Aspinall, E. 138, 142
Australia 192, 285
awig-awig vi, 11, 23, 150, 158, 224,
226, 227, 228, 231, 254, 256,
258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 268, 269, 270, 271, 272,
274, 278

B

Badan Usaha Milik Desa (BUM-
Des) 112, 151, 160
Badung 27, 40, 69, 212, 213, 218,
224, 225, 231, 232, 253, 261,
276, 290, 293, 294
Bajera 197
Bali Aga 3, 235
Bangli vi, 160, 254, 307
Batuan 139
Baturiti 197
Beckmann 182
Belanda 133, 134, 277, 281
Bellefroid 151
Bentham 151, 152
Besakih 4, 72
bhuta yadnya 65
Black, H.C. 281, 282
Bourdieu, P. 43, 44, 45, 51, 54, 57,
58
Buahan 254
Budi Suryawan, C. 285, 295
Buleleng vi, 146, 153, 160, 253

C

Candidasa 235

Candi Kuning 197
Ceking 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36
Cempaga 239, 251
Ceningan 27, 40
China 146, 232
Cina 96
Community Based Tourism 21, 35
Covid-19 viii, xii, 37, 69, 76, 77, 89,
96, 114, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142

D

Denpasar ii, iv, vii, xii, 24, 34, 36,
38, 42, 53, 57, 58, 69, 72, 130,
142, 231, 232, 238, 239, 245,
257, 263, 273, 275, 276, 277,
278, 290, 291, 292, 293, 297
desa wisata 4, 90, 118, 120, 123,
193, 251, 278, 283, 285, 287,
288, 289
dewa yadnya 65, 68
Dharmayuda 257, 263, 275, 276
Dwipayana, A.A.G.N. ix, 135, 137,
142

E

Eco-Enzyme xiv, 115, 124, 129,
130, 131, 132
ecological friendly 31, 224
ecologically sustainable 20
Ehrlich 267
Ekasari 253
ekosistem 7, 18, 31, 177, 205
Endraswara, S. 62, 71
Eropa 78, 96, 237

G

Galungan 148, 155
Garstang, C.W. 281
Gelgel 66, 70
Gianyar vi, 27, 28, 40, 69, 72, 132,
139, 147, 254, 285, 295
globalisasi ix, 134, 206, 208, 218,



235
Gunung Agung 4, 66

H

Hak Pengelolaan Hutan Desa
(HPHD) 145, 148, 151, 155,
156, 157, 158, 161, 162
Hemalatha, M. 125, 126, 129
Hindu 3, 11, 24, 40, 42, 50, 60, 65,
66, 67, 69, 70, 107, 160, 161,
162, 247, 257, 286, 290, 291
Hochbaum, G. 99
Hutan Adat 150, 151, 152, 153, 163

I

India 128, 192, 210
Indonesia ii, viii, ix, 27, 35, 36, 59,
71, 72, 75, 77, 78, 79, 82, 83,
88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 99,
100, 113, 116, 122, 128, 129,
130, 131, 134, 138, 142, 145,
146, 148, 150, 151, 154, 155,
164, 167, 169, 174, 175, 181,
182, 183, 187, 192, 196, 199,
200, 201, 204, 206, 207, 209,
210, 214, 216, 217, 237, 249,
250, 251, 255, 257, 265, 267,
268, 269, 273, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 282, 284, 286,
287, 290, 291, 297, 298
industri pariwisata 18, 38, 41, 51,
52, 61, 77, 126, 140, 216, 220

J

Jaga Wana 158, 159, 161
Jakarta 14, 35, 36, 38, 43, 55, 58, 71,
72, 91, 92, 130, 141, 142, 151,
152, 163, 164, 165, 166, 167,
187, 188, 190, 210, 232, 257,
263, 265, 266, 273, 275, 276
jaminan sosial 138, 182
Jembrana vi, 160, 253
Jepang 78, 192
Joko Widodo 96, 99, 103, 157
Jumlah 253
Jumpai 139

K

kahyangan desa 42, 258
Kahyangan Jagat 65, 70

kahyangan tiga 42, 258
Karangasem vi, 4, 5, 13, 27, 40,
139, 147, 154, 160, 163, 235,
253
kasepeka 264
kearifan lokal 11, 15, 17, 23, 24, 25,
27, 30, 31, 32, 33, 34, 66, 90,
150, 159, 160, 172, 174, 175,
178, 185, 186, 211, 286, 296
kebudayaan Bali 134, 220, 253,
277, 278, 288, 297
Kediri 197
Kedongan 139
Kegels, S. 99
Kemenuh 27, 40, 147
Kerambitan xiv, 189, 193, 194
Klungkung 27, 40, 254, 308
Korn, V.E. 3, 5, 14
Kusumaatmaja, M. 267, 268
Kuta 75, 279, 285, 288, 289, 290,
292, 293, 294, 296

L

Lalanglinggah 197
Lampung 153
Laswell, H. 200
Lawrence Green 102, 103, 107, 111
legal culture 157
Lembaga Perkreditasi Desa 49,
139, 253, 254, 255, 256, 265,
266, 271, 272, 273, 274, 275,
276
Lemukih 148, 155
Lukluk 253

M

Mahayana, IM.A. ii, xiv, 235, 239,
252, 310
Mahfud MD, M. 290
Majapahit 3
Mambal 213, 218, 219, 221, 222,
224, 225, 226, 227, 228, 230,
231, 232
Manggis 4, 311
Mangku Pastika 159, 160
Manukaya 254
Marakatta 62, 65, 66, 70
Markandeya 66
Maslow 59
Mas'udi, W. 138, 142



mendak toya 67
Modal Budaya xiii, 1, 42, 49
modal simbolik 44
modal sosial 56, 135

N

Ningrum, R.K. ii, xiii, 75, 122, 130, 313
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 200, 297
Notohamidjojo 152
Nusantara viii, ix, 232, 312
Nusa Penida 239, 251

O

Oka, I G.N. 262, 275
Orde Baru ix, 134, 135, 137

P

palemahan 25, 30, 33, 49, 172, 217, 291
Panaban 139
Panjer 139
parahyangan 25, 30, 32, 33
pariwisata Bali 37, 39, 51, 68, 69, 103, 120, 140, 160, 214, 288, 289
pariwisata budaya 39, 52, 278, 283, 287, 289, 293
Parsons, T. 51
Paruman Desa 173, 273, 274
pawongan 25, 30, 32, 33, 49, 217
Pecalang hutan 158
Pecalang Jagawana 158
Pecalang Jaga Wana 158, 159, 161
Pelaga 27, 40
pendapatan asli daerah 68, 69
Penebel 194
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) 150, 163
Peraturan Desa 151, 160, 186
Picard, M. 38, 58, 278
praktik sosial 43, 45, 46, 54, 112
Prasasti Trunyan 66
Provinsi Bali vii, 4, 11, 13, 14, 40, 42, 50, 72, 103, 136, 148, 164, 172, 174, 224, 253, 254, 256, 258, 262, 268, 275, 276, 283, 286, 288, 291, 294
Pura Besakih 4, 72

Pura Sakenan 65
Pura Ulun Danu 65
Pura Ulun Suwi 65, 70

R

Rachman, N.F. 181, 187
Radbruch, G. 151
Reformasi 94, 134, 203, 205
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 168, 172
Rosenstock, I. 99
Ruang sosial 45

S

Sad Kerthi 11
Sapta Pesona 116, 120, 131
Sekaa Manyi 63, 68
Sekaa Mula 63, 68
Sekaa Numbeg 63
Selat 148, 155, 157, 158
Selemadeg 197
Selumbung 253
Sembung Gede 193
Sibetan 27
Sirtha, I.N. 260, 261, 276
sistem sosial 41, 42, 45
Soekmono, R. 59, 62, 72
Soepomo, R. 263, 276
Solidaritas sosial 138, 139
subak 42, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
Sudaji 148, 155
Sukasada 155, 158
Sukmajati, M. 138, 142
Sumarto, M. 138, 142
Surpha, I.W. 257, 261, 276

T

Tabanan xiv, 189, 193, 196, 197, 205, 209, 254, 304
Tania Li 135
Taro 66, 279, 285, 294, 295, 296
Tegallalang 26, 27, 28, 29, 35, 36, 295
Tejakula 148, 155
Tenganan Pegringsingan xiii, xiv, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 147,



- 154, 235, 236, 237, 238, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250,
251
- The Ecotourism Society 17, 40
- Titian 154
- Tjondronegoro xi, xii
- Tri Hita Karana xiii, 11, 17, 22, 24,
25, 30, 32, 33, 34, 35, 217, 224,
226, 229, 232, 251, 259, 261,
262
- Trunyan 66, 257
- U**
- Ubud 28, 104, 131, 132, 295, 307,
308
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014
75, 87
- Undang-undang Nomor 10 Tahun
2009 46
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 167
- United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organi-
zation (UNESCO) 4, 15, 35
- UNTWO (World Tourism Orga-
nization) 89
- UU Cipta Kerja 153
- UU No. 23 Tahun 2014 204
- V**
- van Apeldoorn 151
- Van Dunne 281
- Visantini, P. 125, 126, 129
- W**
- Wanagiri 148
- Wardaugh, R. 240, 241, 252
- Wayan Koster 103, 291
- wisata spiritual 4, 156
- Wuhan 96
- Y**
- Yoeti, O.A. 6, 14, 216, 232



TENTANG PENULIS



Dr. Ir. I Gusti Agung Putu Eryani, MT dilahirkan di Denpasar, 8 Januari 1966. Pendidikan dasar ditempuhnya di SD Negeri 26 Pemecutan di daerah kelahirannya. Pendidikan Menengah ditempuhnya di SMP Negeri 2 dan SMA Negeri 2. Gelar sarjana bidang teknik sipil diperolehnya di Universitas Warmadewa pada tahun 1991. Gelar magister bidang teknik sipil diperolehnya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Dan gelar doktor diperolehnya di Universitas Udayana pada tahun 2015. Sejak tahun 1991 sampai sekarang ia menjadi dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Warmadewa.

Matakuliah yang diampu adalah Rekayasa Pantai, Perancangan bangunan Air, Statistik dan Probabilitas, Metodologi Penelitian dan Teknik Presentasi serta Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Prodi Teknik Sipil (S1). Mengampu matakuliah Manajemen Ekowisata di Magister Manajemen (MM). Matakuliah Sistem Subak dan Manajemen Kualitas air di Magister Sains Pertanian (MSP). Matakuliah Statistik Terapan, Metodologi Penelitian dan Penulisan Jurnal di Magister Infrastruktur dan Lingkungan (MRIL) Pascasarjana Unwar.

Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Universitas Warmadewa pada tahun 1997-2000, menjadi Kepala Laboratorium Hidro Universitas Warmadewa pada tahun 2001-2003, menjadi Kepala Pusat Penelitian Universitas Warmadewa pada tahun 2003-2009, dan menjadi Wakil Dekan I Fakultas Teknik Universitas Warmadewa tahun 2016 sampai sekarang.

Kegiatan penelitian yang pernah dilakukan antara lain tentang Pengaruh Perubahan Iklim Global terhadap Karakteristik Kerusakan Pantai di Kabupaten Badung Provinsi Bali, Kajian Perubahan Fungsi Lahan di Muara Sungai Terhadap Pelestarian Sumber Daya Air, Potensi Air Muara Sungai Petanu dan Saba Sebagai Dasar Model



Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Provinsi Bali, Di sela-sela kesibukanya sebagai dosen dan penulis, ia juga menjadi narasumber pada berbagai forum seminar dan/penataran. Selain itu, ia juga menjadi dosen berprestasi tingkat universitas di Universitas Warmadewa serta di tingkat Kopertis Wilayah VIII Denpasar pada tahun 2017.



I Ketut Kasta Arya Wijaya lahir di Singaraja, 26 Maret 1969 gelar sarjana Hukum diperoleh di Fakultas Hukum Udayana Denpasar tahun 1994, kemudian tahun 2000 melanjutkan Kuliah S2 pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang, Konsentrasi Kekhususasan Hukum Agraria. Gelar Doktor diraih September

2019 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar di bidang Hukum Sumber Daya Air.

Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sejak tahun 1995. Pernah menjabat sebagai sektertaris Pusat Penelitian Unwar tahun 2005, sebagai Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa tahun 2008-2016. Dan saat ini sebagai Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) pada Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pasca sarjana Unwar. Penulis juga seorang Advokat/ Jasa pemberi Layanan hukum sejak tahun 1998, menjadi anggota Peradi DPC Denpasar. Konsultan Hukum di beberapa Perusahaan Swasta bergerak dibidang Konsultan pembangunan. Penulis Juga aktif menulis artikel ilmiah di beberapa Jurnal Nasional dan Internasional.



Dr. Drs. I Made Sumada, M.M., M.Si, Lahir di Tabanan, 31 Mei 1965. Lulus Sarjana (S1), Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Ngurah Rai Denpasar, Pada 30 Maret 2007 memperoleh gelar Magister Manajemen dan 3 Oktober 2007 memperoleh gelar Magister Sains

(Administrasi Publik) pada PPs. Universitas Wiajaya Putra Surabaya pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan S3 di Pascasarjana UNPAD Bandung dengan Biaya Beasiswa BPPS Dirjen Diktit Depdiknas dan selesai tahun 2015.

Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kopertis Wilayah VIII 1 Maret 1985, dan Pindah menjadi Dosen PNS dpk di Universitas Ngurah Rai Denpasar pada Tahun 2000. Jabatan yang pernah diemban yaitu, Pembantu Dekan I FISIP UNR 2001-2005, Dekan FISIP 2005-2010 dan Sekretaris Pasrcasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar 2008-2013, dan sekarang tercatat sebagai Dosen pada FISHUM dan MAP PPs. UNR, serta mengajar di MAP PPs. UNWAR. Buku yang pernah ditulis Filsafat Ilmu (2010), Policy Evaluation Applied For School Operational Assistance (2019) dan Kobo di Bali (2021). Penelitian yang pernah dilakukan diantaranya berjudul Evaluasi Kebijakan BOS pada SMPN di Kabupaten Badung Bali (2015), Peranan Kearifan Lokal Bali Dalam Perspektif Kebijakan Publik (2017), *Collaboration Policy Of Regional Office Of National Anti-Narcotics Agency With Local Wisdom (Perarem Desa Pekraman) In Bali Handling Drug Abuse* (2018) dan Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung (2020) dari penelitian tersebut telah diterbitkan dalam jurnal yang bereputasi nasional dan internasional, serta puluhan hasil penelitian yang telah diterbitkan dalam jurnal baik nasional dan internasional



dr. Made Indra Wijaya, MARS., PhD adalah dosen di Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas – Ilmu Kedokteran Pencegahan (IKK-IKP), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), Universitas Warmadewa. Latar belakang pendidikan adalah S1 – Sarjana Kedokteran dan Dokter Umum (Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, lulus tahun 1999), S2 – Magister Administrasi Rumah Sakit (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, lulus tahun 2012), dan S3 – *Doctor of Philosophy* di bidang *Public Health* (University of

Cyberjaya, Malaysia, lulus tahun 2020). Sebelum menjadi dosen, penulis pernah menjabat sebagai Kepala Puskesmas Busingbiu 2 (2001-2004) dan direktur BIMC Hospital (2016-2020). Penghargaan yang pernah diraih adalah PERSI Award (2017 dan 2018), Asian Hospital Management Award (2018), dan KARS Award (2019). Selain di Bagian IKK-IKP, penulis juga bertugas di Pusat Kesehatan Pariwisata (Puskesmas), FKIK Universitas Warmadewa.



I Nengah Muliarta merupakan dosen pada Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Warmadewa. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Udayana. Menamatkan pendidikan S2 pada Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Udayana pada tahun 2002. Menempuh pendidikan S3 di Program Doktor Ilmu Pertanian, Universitas Udayana, pada konsentrasi konservasi air dan tanah. Selain sebagai dosen, juga terlibat dalam bidang Komunikasi dan Media di Warmadewa Research Centre (WaRC), Universitas Warmadewa. Fokus penelitian lebih banyak pada pengelolaan limbah, mulai dari limbah medis hingga limbah pertanian. Tercatat dua buah buku terkait pengelolaan limbah yang telah dihasilkan, yaitu “Limbah Medis dan Pengelolaannya” serta buku “Berkah Limbah Jerami Padi”.

Sempat menduduki jabatan sebagai Komisioner KPID Bali Periode 2014-2017. Selama menjadi komisioner menerbitkan dua buku berkaitan dengan penyiaran diantaranya berjudul “Wajah Penyiaran Bali” dan “Remeh Temeh Penyiaran Radio”. Karya lainnya yang dihasilkan berkaitan dengan penyiaran yaitu buku berjudul “Menyepikan siaran” yang dirilis pada akhir Pebruari 2021. Aktivitas lainnya yaitu terlibat aktif sebagai tim Pembina dan asesor sekolah adiwiyata Provinsi Bali sejak tahun 2012.

Berbekal pendidikan jurnalistik selama di pers kampus hingga akhirnya mendapatkan tawaran menjadi reporter Kantor Berita Radio (KBR 68H) pada periode 1999-2014. Dalam perjalanan kemudian mendapatkan kepercayaan untuk menjadi stringer Radio VOA

sejak tahun 2002 hingga 2014. Menginjak tahun 2008 mendapatkan kepercayaan sebagai penyiar talkshow di Dewata TV. Hingga akhirnya tahun 2014 seluruh kegiatan jurnalistik mesti ditinggalkan karena mendapatkan kepercayaan sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali. Beberapa prestasi yang diraih diantaranya Karya Jurnalistik Radio Terbaik Dalam program Lintas Daerah dari KBR68H (2007), Juara 1 Kategori Feature Radio Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Perwami (2008), Juara Harapan 3 Lomba Artikel Kategori Wartawan yang diselenggarakan oleh Polda Bali (2012), Pemenang 1 Fellowship Perubahan Iklim SIEJ 2013, Juara 1 (media online) Anugerah Jurnalistik Wisata Bahari, Kementerian Pariwisata 2016, dan Adi Acarya Award (Akademi Berkarya) dari Gerakan Menulis Buku (GMB) Indonesia (2020).



Dr. Drs. I Wayan Gede Suacana, M.Si lahir di Ubud, 5 Agustus 1966 adalah dosen pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan dan S2 Magister Administrasi Publik Unwar. Tamat SMAN 3 Denpasar (1985) S1 Ilmu Pemerintahan UGM (1990) S2 Administrasi Negara UGM (1997) dan S3 Kajian Budaya Unud (2008). Kini sebagai Ketua Pusat Kajian Pancasila Unwar, Ketua Yayasan Dvipantara Samskrtam dan Ketua Litbang

Veda Poshana Ashram Pusat. Peminat Hatha Yoga, Meditasi, Bahasa Sanskerta dan Wirama Kakawin ini sebelumnya sebagai Pemimpin Redaksi Jurnal Sosial Politik Sarathi, 1993 s.d. 2013, Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmu Sosial Sintesa 1999 s.d 2005; Redaktur Pelaksana Majalah Singhadwala Unwar 1993 s.d 1995; Kelompok Ahli Pembangunan Bangli 2010 s.d. 2016, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Bali 2010 s.d. 2018, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Unwar 2012 s.d. 2016, Ketua Bidang Kerjasama Kelembagaan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Pusat 2015 s.d. 2019. Suami dari Dra. Ni Nyoman Trisna Yudhani, Apt ini telah menjalani Prosesi Diksa Acharya (2015) sebagai persiapan menuju *Milestone* ke-3 Catur Asrama, yaitu *Wanaprastha*, dengan *swadharma* pendalaman praktik disiplin spiritual/ sadhana, Hatha Yoga dan Meditasi. Pengelola

Usaha Griya Sehat *Bali Siddha Ayurveda* dan Pondok *Prema Ubud* ini memiliki prinsip hidup “*Me nahi karatha Hari hi karatha Hari hi karatha kevalam*” (Bukan aku tetapi Tuhanlah Sang Pelaku, Tuhanlah Pelaku satu-satunya). Alamat e-mail yang bisa dihubungi: suacana@gmail.com.



I Made Suwitra lahir di Klungkung pada hari Kamis Pon Wuku Krulut Tahun 1960. Menyelesaikan Sarjana Hukum (1984) di Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali. Magister Hukum (2000) di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. Meraih Gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur (2009) dengan Judul Disertasi: “Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional”. Jabatan Fungsional Guru Besar (Profesor) diterima Tahun 2014. Mengawali profesi dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram 1985-1988, di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar 1988-sekarang. Pernah menduduki jabatan struktural sebagai Sekretaris Bagian Hukum dan Masyarakat (1996-1990), Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat (1990-1997), Pembantu Dekan I (2000-2004), Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (2012-2016), Kepala Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa (2016-sekarang). Sebagai Dosen Teladan Tingkat Nasional mewakili Kopertis Wilayah VIII (1997), Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden RI (1999), Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden RI (2008). Sebagai Tim Penasihat Produk Hukum Pemerintah Kota Denpasar (2010-sekarang), Kelompk Ahli Pembangunan/Tim Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Klungkung (2014-sekarang), Ketua Divisi Hukum Kopertis Wilayah VIII/LLDikti Wilayah VIII (2015-sekarang), Anggota Dewan Kehormatan Peradi Denpasar (2017-sekarang), Tim Perancang RUU Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (2018), komunitas Lingkar Belajar Hukum Agraria dan Hukum Adat Indonesia (LIBERA), Aktif dalam berbagai pertemuan



ilmiah tingkat Perguruan Tinggi, Daerah, dan Nasional serta sebagai Ahli Agraria di Pengadilan Negeri dan Tata Usaha Negara.

Kontak Person: 081805597794. Email addres: madesuwitra@yahoo.co.id



Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara,SH,M. Hum, MH. Lahir di Badung, 6 Agustus 1958. Menyelesaikan studi ilmu Sejarah (konsentrasi Politik dan nasionalisme Indonesia), di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana tahun 1984, Magister Ilmu Humaniora Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Tahun 1996,

kosentrasi Sosiologi politik dan Nasionalisme Indonesia, Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Mahasaraswati Tahun 2003 (Hukum Administrasi Negara), Tahun 2010 meraih Gelar Doktor Kajian Budaya Pascasarjana Universitas Udayana, dengan kosentrasi Hukum dan Budaya. Tahun 2015 menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum (MH) Pascasarjana Universitas Udayana, Kosentrasi Hukum Pariwisata (Hukum Kepailitan). Jabatan yang pernah dijabat antara lain: Ketua jurusan Sejarah Universitas Warmadewa Tahun 1985-1986 (pendiri jurusan sejarah di Universitas Warmadewa. Tahun 1986- 1992, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Tahun 1999-2001 sebagai Wakil Dekan I Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Tahun 2001-2004 menjadi Dekan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Tahun 2013-2016, sebagai Kabid Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Warmadewa. Tahun 2016-2020 sebagai Kepala Lembaga Pengabdian Universitas Warmadewa; dan Tahun 2020-2024, sebagai Kepala Pengabdian Universitas Warmadewa. Kini menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, juga berkarier sebagai Advokat.

Tulisan yang telah diterbitkan: *Pertarungan Politik Hukum dan politik Kebudayaan : Otonomisasi Desa adat Di Bali* (Udayana University Press); *Manusia dan Kebudayaan Indonesia Dari Filsafat Ilmu sampai Kajian Budaya*, *Catatan Kritis Pergulatan Hukum dan Kebudayaan* (Udayana University Press); *Hukum Kepailitan Teori dan Praktik*, 2018 (Warmadewa University Press).

Aktif mengikuti seminar nasional dan Internasional, *workshop*, Pelatihan, melakukan penelitian, melakukan pengabdian, menulis artikel: Sebagai presenter dalam *International Conference Global Connectivity Cross Cultural Connections, Social Inclusion, and Recognition: The Role of Social Sciences, Papers* dengan judul *Law Politic of Tradisional Village and Local Genius Value in Electing Head of Traditional Village (Bendesa Adat Kuta)* “ September 11-12, 2017, presenter dalam *International Conference Sustainability Design and Culture, Papers* dengan judul “*Cultural Practice of Traditional Security Officers (Pecalang)* , *Tourism and The Meaning of the Local Wisdom Value in Bali*”, October 20, 2017, presenter dalam *International Conference and Call for Papers on Bussiness Law and Local Wisdom in Tourism, Papers* dengan judul “*The Cultural Tourism and The The Tourism Law Practices in Bali: Correlation of Local Value and Tourism Activity in Globalization Era*”, Februari 14-15, 2018, dan, presenter International for Papers *Bali Hindusm, Traditional, and Interreligious Studi*, “March 10, 2018. Jurnal ilmiah Internasional : *Journal of Law, Policy and Globalization* “ Human Right and Conflict of Custom in Bali (The Case of “Caste Status” Change Caused Kesepakang in Bungaya Traditional of Karangasem), *Journal of Law, Policy and Globalization* “Public Policy and Role of Traditional Sceruty (Pecalang of Religios Tolerance in The Traditional Village Kuta-Bali”.



I Made Astu Mahayana, S.S., M.Hum., lahir di Denpasar, 16 Juni 1990 merupakan dosen tetap Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Warmadewa. Menempuh jenjang pendidikan S1 Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Sastra, Universitas Warmadewa (2012); dan Magister Linguistik Pascasarjana Universitas Warmadewa (2015). Penulis

telah melakukan beberapa penelitian, di antaranya berjudul “Pola Pengalihan Bahasa Ibu Pada Anak-Anak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung” (2019); “Kajian Ekowisata Linguistik Pada Khazanah Leksikon di Daerah Pariwisata Sanur” (2019); dan “Tenganan Pegringsingan, Desa Wisata Potensial Di Karangasem,

Bali” (2019). Selain telah melakukan beberapa penelitian, penulis juga telah melakukan beberapa pengabdian, antara lain “Pemberdayaan Guide Lokal di Obyek Wisata Sangeh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung” (2016 – 2017); “Pengembangan Lingkungan Kepariwisata Berkelanjutan di Desa Sangeh” (2017 – 2018); “Pelatihan Bahasa Inggris Komunikatif bagi Anggota Kepolisian Polisi Sektor Denpasar Selatan” (2019); dan “Pengajaran ESP bagi Polisi Pariwisata di Sekolah Tinggi Polda Bali” (2020). Adapun beberapa artikel penulis yang dimuat di beberapa jurnal di antaranya “Offensive Languages in Bad Boys 2” (*KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya vol. I No. 1 Tahun 2017*); “Structure Shift in Indonesian-English Translation” (*KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya vol II No. 1 Tahun 2018*); “Taboo Words Found in Crank 2: High Voltage” (*KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya vol III No. 1 Tahun 2019*); “Leksikon-Leksikon Flora Dalam Metafora Bahasa Bali: Kajian Ekolinguistik” (*KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya vol III No. 2 Tahun 2019*); “Lexicon that Survives, Changes, and Innovates in Sanur Area: Ecotourism Linguistics” (*ICTMT 2019: Proceedings of the First International Conference on Technology Management*); “The Use of Taboo Words in Denpasar” (*International Journal of Psychosocial Rehabilitation vol 24 issue 28*).



Prof. Dr. Ir. I Wayan Runa, M.T., IAI, AA, selaku Guru Besar Konservasi Arsitektur lahir di Desa Pesedahan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem pada Soma Pon Sinta, 11 Juni 1962. Tinggal di Jalan Soka, Gang Kertapura VB No. 9, Kesiman Denpasar (80237), HP. 08174775043 dengan alamat E-mail: sarwagunawayan@gmail.com. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana / S-1 di Teknik Arsitektur Universitas Udayana tahun 1986 dengan judul Tugas Akhir: Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Udayana di Bukit Jimbaran. Kemudian menyelesaikan Magister / S-2 Teknik Arsitektur di Universitas Gadjah Mada tahun 1993 dengan judul Tesis: Perubahan Rumah Tinggal Tradisional Desa Adat Tenganan Pagringsingan. Menempuh

pendidikan Doktoral / S-3 juga di Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi ilmu Konservasi Arsitektur selesai tahun 2004 dengan judul Disertasi: Sistem Spasial Desa Pegunungan di Bali, Dalam Perspektif Sosial Budaya. Mata Kuliah yang diampu di S-1 adalah Konservasi Arsitektur, Konservasi Alam dan Bangunan, Desain Arsitektur 4 dan 5. Juga mengajar di S-2 / Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan (MRIL). Aktif sebagai Ketua Pembina di Yayasan Puspadi Bali (Sosial Disabilitas), dan Ketua Yayasan Nusa Jaya / Nusantara Jaya (Sosial Spiritual).



A. A. Gede Raka adalah Budayawan dan Dosen Fakultas Sastra Universitas Warmadewa Denpasar, Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Arkeologi di Faksas Unud th 1985; S 2 di Program Pascasarjana Unhi Denpasar th 2008; dan S3 Program Doktor Pascasarjana Unud th 2015. Sejak th 2016 dipercaya sebagai Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Unwar. Sejak th 2018 Konsultan Desa Wisata Kabupaten Badung. Dalam Karya Seni, Memberi Ide Cerita Tari Kebesaran Pascasarjana Unwar 2017 dan Tari Kebesaran DPRD Bali 2018. Dipercaya PHDI Pusat mentransformasi Nilai-nilai Pancasila kedalam bentuk Ukiran Panil Kayu untuk Istana Presiden. Karya bukunya Pancasila, Kearifan Lokal dan Masyarakat Bali 2019.



I Ngurah Suryawan, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Warmadewa, Bali dan peneliti di *Warmadewa Research Centre* (WaRC). Menyelesaikan pendidikan Doktor Antropologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan beasiswa penulisan disertasi dari Asia Research Institute (ARI), National University of Singapore (NUS)

pada tahun 2013 dan NUFFIC-NESO di Faculty of Humanities, Universiteit Leiden, Belanda pada tahun 2014. Program penelitian pascadoktoral dimulainya dari tahun 2016-2017 tentang ekologi budaya orang Marori dan Kanum di Merauke, Papua dalam skema ELDP (*Endangered Languages Documentation Programme*) bekerjasama dengan *Australian National University* (ANU). Menjadi peneliti tamu di KITLV (*Koninklijk Instituut voor taal-, Land- en Volkenkunde*), Universiteit Leiden 2017 – 2018 untuk menulis penelitiannya tentang terbentuknya kelas menengah Papua di daerah-daerah pemekaran. Bukunya di tahun 2020 diantaranya adalah *Siasat Elit Mencari Kuasa: Dinamika Pemekaran Daerah di Papua Barat* (2020), *Saru Gremeng Bali: Sepilihan Esai Kritik Kebudayaan* (2020), *Menabur Pesona, Merebut Kuasa: Dinamika Penguatan Desa Adat dalam Politik Kebudayaan Bali* (2020 – Editor), *Berhala-Berhala Infrastruktur: Potret dan Paradigma Pembangunan Papua di Masa Otsus* (2020—Editor). Bukunya terbaru adalah: *Bali, Pandemi, Refleksi: Dinamika Politik Kebijakan dan Kritisisme Komunitas* (2021). Saat ini sedang melakukan penelitian tentang studi kompartif dinamika masyarakat adat dan eksploitasi sumber daya alam di Bali dan Papua. Emailnya: ngurahsuryawan@gmail.com.
[com/mecahsenyap@gmail.com](mailto:mecahsenyap@gmail.com).



dr. Rima Kusuma Ningrum, MMedEd lahir di Semarang, 31 Oktober 1985 merupakan dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa. Pada tahun 2007, Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Kedokteran (S.Ked) di Universitas Gadjah Mada dan tahun 2009 menyelesaikan Pendidikan Profesi Dokter (dr.) di Universitas Gadjah Mada. Gelar Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran (MMedEd) diperoleh pada tahun 2015 di Universitas Gadjah Mada dengan tesis yang berjudul Hubungan Regulasi Diri dalam Belajar dengan Prestasi Akademik pada Mahasiswa Kedokteran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa. Penulis pernah menduduki jabatan struktural sebagai Sekretaris *Medical Education Unit* FKIK Unwar (2015-2017), Kepala *Medical Education*

Unit FKIK Unwar (2017-2020) dan Kepala Lembaga Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Universitas Warmadewa (2020-sekarang). Pada tahun 2021, Penulis menjadi Reviewer terpilih Dikti untuk Program Kompetisi Kampus Merdeka.



Desak Gde Dwi Arini, SH., M.Hum adalah dosen Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Warmadewa tahun 1989. Melanjutkan pendidikan Magister pada bidang Hukum Ekonomi dan Teknologi di Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2002.



Dr. Dra. Anak Agung Inten Mayuni, M.Hum., lahir di Denpasar, 15 Mei 1959. Penulis adalah dosen tetap Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Warmadewa sejak 1988. Menempuh jenjang pendidikan S1 Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Udayana, (1988); Magister Linguistik Kebudayaan, Fakultas Sastra Universitas Udayana (2005); dan Program Doktor Ilmu Agama dan Kebudayaan, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar (2020). Penulis telah menerjemahkan beberapa teks Mahabharata berbahasa Inggris karya Kamala Subramaniam, antara lain Sabha Parwa (2009); Wana Parwa (2010); Wirata Parwa (2011); Udyoga Parwa (2012); Bhisma Parwa (2013); Drona Parwa (2014); Salya Parwa (2015); dan Karna Parwa (2016). Beberapa artikelnnya juga telah dimuat dalam beberapa jurnal, antara lain “Perempuan Karir dan Poligami dalam Perspektif Hindu” (Dharmasmerti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan, Vol IV No.8, hlm. 77-186); “Perempuan dalam Perspektif Hindu” (Dharmasmerti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol. V Nomor 10 Oktober 2009); “The Equivalence in Translation of Puja Tri Sandhya From Indonesian to English” (Kulturistik Fakultas Sastra, Universitas


Warmadewa, Tahun 2019); “Wacana Eskatologi dalam Putru Pasaji” (Dharmasmerti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan Vol. 20, Tahun 2020); “Eschatology Discourse in Putru Pasaji” (International Journal of Psychosocial Rehabilitation Vol. 24, Issue 05, 2020); “Strategi Hindu Umat hindu Memasuki Era Baru: Refleksi Sosiologi Hindu Menyikapi Revolusi Industri 4.0, Pandemi Covid-19, dan Society 5.0” (Ida Bagus Gde Yudha Triguna, Anak Agung Inten Mayuni, Nanang Sutrisno, dalam Jurnal Penelitian Agama Hindu, Vol. 4 No. 4, 2020, hlm. 237–244); 19 dan “Konstruksi Wacana Moral dalam Putru Pasaji” (Anak Agung Inten Mayuni, Ida Bagus Gde Yudha Triguna, Nanang Sutrisno, dalam Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, Vol.3 No. 3, 2020, hlm. 327–338).



Dr. Putu Ayu Sriasih Wesna, S.H., M.Kn, lahir di Denpasar, Bali 19 Maret 1988. Gelar Sarjana Hukum nya diperoleh pada tahun 2010 pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Magister Kenotariatan diperoleh dari Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2012. Keinginan penulis yang begitu besar untuk selalu berbagi ilmu yang bermanfaat kepada banyak orang, serta untuk kepuasan bathin yang mungkin tidak bisa Penulis dapatkan pada profesi lain, maka sejak tahun 2014 Penulis menjadi Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar-Bali. Keinginan untuk terus belajar, mendapatkan pengalaman dan ilmu baru, serta meningkatkan kualitas diri sebagai Dosen yang merupakan salah satu profesi yang mulia, sehingga pada tahun 2015 Penulis memutuskan untuk kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana. Lulus pada tahun 2019 dengan jangka waktu 3,5 tahun dengan predikat *cum laude* dan menjadi yudisiawan terbaik pada Yudisium Fakultas Hukum Universitas Udayana Periode Juli 2019 di usia yang masih relatif muda yaitu 30 tahun merupakan pengalaman terbaik Penulis selama menempuh Pendidikan. Penulis aktif melakukan penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding, jurnal nasional maupun internasional.

Adapun mata kuliah yang diampu oleh Penulis pada S1 (Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa), antara lain Hukum Jaminan, Hukum Perikatan, Hukum Perancangan Kontrak, Hukum Perdata, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Alih Teknologi, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi, dan Hukum Bisnis pada S1 (Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa). Pada S2 Program Studi Magister Kenotariatan mata kuliah yang diampu yaitu Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan Hukum Perbankan, Hukum Perusahaan, Hukum Alih Teknologi dan Hukum Jaminan. Selain sebagai Dosen, Penulis juga seorang advokat PERADI. Email penulis : ayuwesna@gmail.com





Mengikuti argumen dari James C. Scoot dalam bukunya *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia* (2009), sejatinya desa-desa di wilayah Asia Tenggara tidak pernah sepi dari penetrasi pengaruh kekuatan pemerintahan supra-desa atau negara. Desa-desa tersebut, khususnya di wilayah pegunungan Asia Tenggara sudah sejak lama menjalankan strategi bertahan agar tetap otonom dari pengaruh supra-desa, terutama dari berbagai pengaruh kekuasaan negara. Konteks Bali memberikan gambaran ekspansi pariwisata menyentuh wilayah-wilayah perdesaan. Relasi desa dengan moda ekonomi pariwisata memiliki sejarah panjang dan penuh pasang surut. Ekowisata menjadi wacana baru yang membingkai relasi desa dengan pariwisata. Artikel-artikel dalam buku ini menyemaikan gagasan penguatan posisi dan eksistensi desa (koeksistensi antara desa dinas dan desa adat) di Bali dalam relasinya dengan berbagai aspek yang terikat di dalamnya. Berbagai aspek yang dielaborasi dalam buku ini, diantaranya narasi kearifan lokal dan modal budaya, inisiatif-inisiatif penguatan desa adat, kontestasi ruang hidup dan sumber daya alam yang dimiliki desa, dan dinamika hubungan bahasa, hukum, dan ekonomi masyarakat desa. Keseluruhan aspek-aspek tersebut bekelidan dan sangat mempengaruhi gerakan penguatan ataupun bisa jadi pelemahan desa.



ISBN 978-623-6013-35-9

